

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-DESA NOW DI DESA WONOKOYO KECAMATAN KAPONGAN KABUPATEN SITUBONDO

Usrotul Hasanah¹; Dina Yuli Ariyanti²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email: uusstbond@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam PERBUP No. 3 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin. Adapun Alur Pelaksanaan AKP yaitu: Sosialisasi AKP di tingkat desa, Pelatihan AKP, Sosialisasi AKP di tingkat dusun, Diskusi AKP, Pemasukan Data (*data entry*), Uji Publik Hasil AKP, Penyepakatan, Penyebaran dan Pemanfaatan Hasil Akhir AKP, Monitoring dan Evaluasi Proses

Dalam implementasi di desa wonokoyo sudah melakukan proses pendataan AKP dengan cukup baik. Karena pemerintah desa wonokoyo sudah melakukan pendataan sesuai dengan alur AKP yang sudah ditetapkan dalam PERBUP No. 3 Tahun 2017.

Kunci : Efektivitas, Pelaksanaan E-Desa Now, Desa Wonokoyo

PENDAHULUAN

Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya kesejahteraan semata. Padahal, kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multi dimensi. Rendahnya tingkat hidup, yang sering kali dijadikan sebagai alat pengukur utama kemiskinan, pada hakikatnya hanya merupakan salah satu mata rantai dari sejumlah faktor penyebab munculnya lingkaran kemiskinan. Data statistik tentang kemiskinan yang tersedia umumnya disusun hanya berdasarkan indikator kesejahteraan bersifat *agregat*. Karena itu, tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami gejala kemiskinan secara memadai. Data itu hanya mampu mengungkap besaran kemiskinan di suatu wilayah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Namun, tidak dapat dipakai sebagai acuan untuk mengungkap sifat kemiskinan, sumber-sumber penyebab kemiskinan, maupun perilaku kelompok miskin dalam menyiasati keterbatasannya. Oleh karenanya, sulit dipakai sebagai acuan untuk memecahkan persoalan kemiskinan pada tingkat mikro.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak

melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA Situbondo selaku Sekretariat TKPKD menyusun Buku Pedoman Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) ini. Hal ini berdasarkan PERBUP Situbondo No. 99 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan, bahwa kemiskinan merupakan masalah multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera ditanggulangi karna menyangkut harkat, martabat dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum.

Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mentransformasikan pemahaman dan teknis pelaksanaan pendataan di Tingkat Desa/Kelurahan berbasis semangat partisipatif, sehingga data yang diperoleh *valid* dan akurat. Terutama bagi daerah yang berkategori sebagai daerah tertinggal.

Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) menganggap data yang disusun dengan basis partisipatif memiliki peran yang sangat penting karena menjadi pijakan dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan data yang *valid*, diharapkan akan meningkatkan kualitas kebijakan dan rasa keadilan rakyat.

Daerah Tertinggal adalah Wilayahnya *relative* kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, (fungsi inter dan intra spasial baik pada aspek alam, aspek manusianya, maupun prasarana pendukungnya).

Kabupaten Situbondo dikategorikan sebagai Daerah Tertinggal dalam skala Nasional, adalah Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat erat hubungannya dengan IPM (Indek Pembangunan Manusia, yang meliputi Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf) dan Kemampuan Keuangan Daerah.

Adapun 5 kriteria dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo berdasarkan klasternya yaitu:

Tabel 5 (Lima) Klaster Penduduk Miskin di Kabupaten Situbondo

NO.	KLASTER	JUMLAH
1.	Tidak Miskin	12.400
2.	Rentan Miskin	26.145
3.	Hampir Miskin	67.805
4.	Miskin	114.350
5.	Sangat Miskin	8.808
JUMLAH KESELURUHAN		229.508

(Sumber: BAPPEDA Kabupaten Situbondo, 3 Maret 2020)

Dari data tabel diatas jumlah Klaster penduduk miskin di Kabupaten Situbondo adalah 229.510 jiwa.. Dari data tabel diatas jumlah Klaster penduduk miskin di Kabupaten Situbondo adalah 229.508 jiwa. Sedangkan Desa Wonokoyo memiliki jumlah 6 dusun, Jumlah keseluruhan Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Wonokoyo yaitu 1.318 KK, dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.370 jiwa. dengan masyarakat miskin di Desa Wonokoyo yaitu sebanyak 1.014 keluarga.

Salah satu tugas pemerintah adalah memberikan pelayan publik kepada masyarakat secara baik, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagai salah satu upaya pemerintah yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yaitu dengan penggunaan dan pemanfaatan sarana teknologi dan informasi secara optimal atau yang dapat disebut dengan *Elektronik Government (E-Government)*. Menurut *The World Bank Group* (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), *E-Government* ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.

Sedangkan dalam buku *E-Goverment In Action* (2005:5) menguraikan *E-Goverment* adalah suatu usaha menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (*Shared goals*) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan, oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama dari pada *stakholder* yang ada misalnya:

- Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakatnya;
- Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparans;
- Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat meluli kinerja pelayanan publik;
- Menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis.

Dalam tujuan tersebut, meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam perkembangan teknologi saat ini (*E-Government*) untuk mengetahui tingginya masyarakat miskin dikabupaten situbondo.

Pemerintah Kabupaten Situbondo Jawa Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) membuat terobosan baru dengan meluncurkan sistem data berbasis partisipatif sebagai rujukan penanggulangan kemiskinan dimana di Kabupaten Situbondo jumlah kemiskinan masih tersisa 13%, maka Pemerintah membuat terobosan tersebut melalui Aplikasi *E-Desa Now* (Sistem Informasi Terpadu Perencanaan Partipatif Supra Desa) dalam menggunakan metode Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP). *E-Desa Now* merupakan suatu data yang digunakan berdasarkan data di Kabupaten Situbondo dan data tersebut yang dilakukan secara partisipatif yang dilakukan oleh warga untuk mengidentifikasi golongan penduduk miskin.

Tujuan dibuatnya *E-Desa Now* yaitu:

1. Untuk mendapatkan data penduduk miskin yang *valid* sesuai kondisi daerah dan klasternya
2. Untuk mendapatkan data penduduk miskin tunggal sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan
3. Untuk Pemerintah Daerah Situbondo lebih cepat dan tepat sasaran dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Daerahnya

Terbentuknya *E-Desa Now* ini berawal dari UU No. 99 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemerintah Daerah Situbondo lebih menspesifikasikan lagi melalui PERBUP No. 03 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin. Adanya *E-Desa Now* Pemerintah bisa mengontrol tingkat kemiskinan masyarakat, mulai dari sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, dan tidak miskin.

Dengan *E-Desa Now*, data kemiskinan bisa didapatkan dengan *valid*, sehingga kebijakan dan bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran. Aplikasi *E-Desa Now* di Resmikan Langsung Pada 28 Desember 2017 Oleh Bapak Bupati Situbondo Bapak H. Dadang Wigiarto di Gedung Olahraga (GOR) Baluran Kabupaten Situbondo.

Aplikasi *E-Desa Now* adalah aplikasi supra struktur dimana keinginan Kabupaten Situbondo ingin mempunyai data tunggal di daerahnya, data ini juga diharapkan akuntabel dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Dari observasi awal dinas mempunyai data sendiri-sendiri sehingga data tersebut tidak sama di setiap dinas, dikarenakan adanya data yang berbeda-beda di setiap dinas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo kebingungan dalam menentukan data yang akurat dikarenakan di masing-masing dinas berbeda-beda datanya dan masih diragukan kebenarannya.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Situbondo berinisiatif untuk membuat data tunggal daerahnya sendiri sehingga bisa mempermudah dinas-dinas yang terkait untuk mengambil data yang sama dan terjamin kebenarannya. Dengan adanya aplikasi *E-Desa Now* ini Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki data tunggal di daerahnya sendiri sehingga dinas-dinas yang terkait memiliki data-data yang sama, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka semua data mengenai kemiskinan dan kependudukan di

Kabupaten Situbondo hanya mempunyai data tunggal daerah yang sama yaitu dengan aplikasi *E-Desa Now*. Data *E-Desa Now* ini didapatkan dari pendataan data Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) Tahun 2016 dimana Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) ini hanya berfokus pada data kemiskinan saja.

Pelaksanaan Aplikasi *E-Desa Now* yang Merupakan Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) masih terdapat kekeliruhan data, sehingga update data yang diharapkan belum tercapai. Peneliti mengambil sampel secara acak dengan membuka aplikasi *E-Desa Now* ternyata terdapat kekeliruhan data masalahnya sebagai berikut: Tidak samanya data laporan dengan data lapangan, tidak transparannya data kepada publik, Pengiriman data AKP ke pihak BAPPEDA lambat, Terkendalanya gaji yang diperoleh setiap bulan dengan gaji Rp. 150.000 menjadi masalah dalam pendataan di Desa-Desa yang ada di Situbondo dikarenakan harus mendata satu persatu warga yang ada sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendata, jadi aparat desa mengerjakan pendataan dengan mengerjakan di atas meja sehingga hasil yang ada tidak seluruhnya benar dengan fakta yang ada dilapangan.

Dengan permasalahan yang ada dimana petugas yang mendata tidak mempunyai kompetensi tentang metode pengambilan data, sosialisasi yang ada juga kurang baik/*misskomunikation* antara desa dengan Ketua RT sehingga Ketua RT yang bersangkutan untuk mendata tugas rutинnya tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan lagi saat input data tim dari desa tidak ada yang mengontrol

sehingga data yang di dapatkan tidak tahu kebenarannya dan tidak bisa dipastikan kebenarannya.

EFEKTIVITAS

Supriyono mendefinisikan pengertian efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”.

Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan hubungan keluaran tanggung jawab dengan sasaran yang harus di capai. Semakin besar keluaran yang dihasilkan dari sasaran yang akan dicapai maka dapat dikatakan efektif dan efisien. Suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan Untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Ketepatan Sasaran Program
- b. Sosialisasi Program
- c. Tujuan Program
- d. Pemantauan Program

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan keputusan kebijakan desa, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau putusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai secara tegas dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap undang-undang/peraturan-peraturan

yang bersangkutan.

E-DESA NOW

E-Desa Now adalah aplikasi supra struktur yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dimana aplikasi ini memuat data tunggal daerah Kabupaten Situbondo, Aplikasi *E-Desa Now* merupakan sebuah basis data spasial desa yang disusun dengan metode partisipatif sebagai dasar perencanaan pembangunan desa dan kabupaten. Dengan adanya *E-Desa Now* pemerintah bisa mengontrol tingkat kemiskinan masyarakat, mulai dari sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, dan tidak miskin. Dengan adanya *E-Desa Now*, data kemiskinan bisa didapatkan dengan *valid*, sehingga kebijakan dan bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran. Dengan adanya data tunggal ini, data ini diharapkan akuntabel dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Berawal dari kerancuan atau tidak tepat sasaran tentang data kemiskinan di Kabupaten Situbondo, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo:

1. Perlu adanya integrasi atau pembaruan untuk menyamakan data kemiskinan yang ada di Kabupaten Situbondo
2. Perlu adanya program terpadu untuk menyamakan data kemiskinan
3. Perlu adanya data tunggal daerah agar data bisa akurat kebenarannya

JENIS

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para pengambil kebijakan yang berasal dari Lembaga/Instansi Pemerintah, Kantor Desa Wonokoyo,. Data primer mencakup :

- (1) Proses pengumpulan data
- (2) Penerapan program dan dampaknya.

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan data penunjang yang relevan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Masyarakat Data penunjang diperoleh dari laporan hasil penelitian terkait, jurnal, internet serta sumber-sumber lainnya.

PENGUMPULAN DATA

Data yang dikumpulkan;

- a. Tingkat kepentingan dan pengaruh *stakeholders* terhadap keberhasilan program.
- b. Pendataan data kemiskinan, Pengumpulan data dan Peinputan data, dan lain sebagainya.
- c. Persepsi masyarakat tentang data AKP dan strategi kebijakan.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *E-Desa Now*

Ketepatan Sasaran

Sejauhmana pelanggan dari program tersebut tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Data yang diperoleh dari desa diharapkan tepat sasaran sebagaimana kriteria kemiskinan yang ada di PERBUP No. 03 Tahun 2017. Di Desa Wonokoyo Pelaksanaan *E-Desa Now* sangat efektif hal ini dibuktikan dengan data kemiskinan relatif minim kesalahan dan hanya ada data tunggal kemiskinan.

Sosialisasi Sistem

Kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran program pada khususnya. Dalam Sosialisasi sistem masih terkendala dengan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga banyak belum memahami keberadaan sistem aplikasi tersebut.

Tujuan Sistem

sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pemantauan Sistem

Kegiatan yang dilakukan setelah pemberian hasil dari program sebagai bentuk perhatian kepada pelanggan. Sedangkan pemantauan juga masih kurang hal ini disebabkan karena tidak semua Desa menggunakan aplikasi tersebut.

Pembahasan

Pemanfaatan Sistem *E-Desa Now*

Sistem *E-Desa Now* dibutuhkan oleh desa untuk ketepatan data miskin oleh desa Wonokoyo Khususnya dan kabupaten Situbondo umumnya.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Sistem *E-Desa Now*

Faktor Pendukung :

Adanya informasi diberikan oleh masyarakat, Dokumen Hasil Data AKP Desa Wonokoy, adanya perbup No.03 Tahun 2017

Faktor Penghambat :

Evaluasi sistem yang tidak rutin, kurangnya sumber daya manusia yang profesional, kurangnya sarana prasaran yang memadai.

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Rencana tahapan berikutnya adalah mengembangkan penelitian ini dengan memfokuskan pada penelitian dan publikasi tentang kebijakan dan pendataan

kemiskinan yang benar dengan menganalisis lebih mendalam tentang kemiskinan yang ada di desa dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian sebagai berikut:

Tujuan dari dibuatnya *E-Desa Now* yaitu:

1. Untuk mendapatkan data penduduk miskin yang *valid* sesuai kondisi daerah dan klasternya;
2. Untuk mendapatkan data penduduk miskin tunggal sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan;
3. Untuk Pemerintah Daerah Situbondo lebih cepat dan tepat sasaran dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Daerahnya.

Dari hal diatas dapat dikatakan bahwa sistem pelaksanaan *E-Desa Now* di Desa Wonokoyo cukup efektif meski masih banyak yang harus dibenahi. Dalam pelaksanaan di desa wonokoyo sudah melakukan proses pendataan AKP dengan baik sesuai dengan delapan aspek. Karena pemerintah desa wonokoyo sudah melakukan pendataan sesuai dengan alur AKP yang sudah ditetapkan dalam PERBUP No. 3 Tahun 2017, kecuali dalam aspek uji publik di Desa Wonokoyo hanya dilakukan ditingkat desa saja, seharusnya uji publik dilakukan ditingkat RT/RW terlebih dahulu baru lanjut ditingkat Dusun, lanjut lagi di tingkat desa, hingga yang terakhir ditingkat kecamatan. Dan juga dalam aspek Penyepakatan, penyebaran, dan pemanfaatan hasil AKP di desa wonokoyo belum memampangkan hasil AKP di papan informasi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M. 2003. *Pokok- Pokok Teori Sistem*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ibrahim, Amin. 2009. *Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Idochi, Anwar. 2009. *Pengembangan Sistem Informasi di Perguruan Tinggi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik berbasis Teknologi Digital*. Andi Offset. Yogyakarta.

- Jalaludin, Asep. 2011. *Modul Sistem Infomasi Manajemen*.
- Kadir, Abdul dan Terra Ch. Triwahyuni. 2003. *Pengenalan Teknologi Informasi*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi, dkk. 2004. *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik*. UGM Yogyakarta.
- McLeod, Raymond dan P. Schell, George. 2009. *Sistem Informasi Manajemen*. Salemba Empat. Jakarta.
- Rianto, Budi dan Tri Lestari. 2012. *Polri dan Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik*. Putra Media Nusantara. Surabaya
- Rusdiana, dan Moch. Irfan. 2014 *Sistem Informasi Manajemen*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Rochaety, Eti dkk. 2011. *Sistem Informasi Manajemen*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Santosa, Panji. 2012. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta
- Yusup, Pawit M dan Priyo Subekti. 2010. *Teori dan Praktik Penelusuran Informasi (Information Retrieval)*. Kencana. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Kemiskinan
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Bupati No. 99 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin

Internet:

- <https://jatim.bps.go.id/pressrelease.html>
- <https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/01/30/755/persentase-penduduk-miskinmenurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-tahun-2012-2017.html>
- <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1261/persentase-penduduk-miskinmenurut-kabupaten-kota-2015---2017.html>
- <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/read/2018/03/24/59454/situbondo-dalamkesimpangsiuran-data-kemiskinan>

Arsip Instansi:

- Buku Pedoman Pendataan AKP Situbondo Tahun 2019

ProfilDesaWonokoyo

Struktur dan Visi Misi DesaWonokoyo

Dokumen Hasil Data AKP DesaWonokoyo